

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah konsep yang multikompleks atau sangat banyak kaitannya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang berupa material saja, namun termasuk kesejahteraan non fisik yang immaterial atau tidak terdiri dari materi.

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sebuah sorotan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugikan. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance* yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasarannya diperlukan pengukuran kinerja. Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat secara transparan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi program atau kegiatan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang dapat digunakan oleh organisasi sektor publik yaitu konsep *Value For Money*. Konsep ini akan memusatkan pengukuran pada tiga aspek, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu program kegiatan. Konsep ini dapat menggambarkan bagi masyarakat apakah penggunaan dana anggaran dapat menghasilkan suatu nilai-nilai tertentu atau tidak. Konsep ini akan meninjau baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Penggunaan konsep ini, dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan kesadaran mengenai penggunaan uang publik sebagai anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah untuk memberikan akuntabilitas publik, serta dapat memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat secara ekonomis dan efisien.

Pengukuran kinerja dengan penggunaan konsep *Value For Money* akan mengukur dalam hal *input*, *output* dan *outcome*. Pengukuran dari sisi ekonomis, akan mengukur perbandingan antara input dan *input value*. Dimana pada pengukuran ini perolehan *input* dengan harga terendah untuk mendapatkan

kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Pengukuran dari sisi efisiensi akan mengukur perbandingan antara *output* dan *input*. Dimana pada pengukuran ini akan membahas pencapaian hasil dengan penggunaan input yang rendah. Pengukuran dari sisi efektivitas akan mengukur perbandingan antara *outcome* dan *output*. Dimana pada pengukuran ini akan membahas bagaimana pencapaian hasil dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Menurut Abdul Halim (2014:128) konsep *Value for Money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektifitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Ekonomis merupakan hubungan antara nilai uang (pasar) dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Efektivitas adalah menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:5) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perbandingan *input* dengan *input value* dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan *output* dengan *input* berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran). Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money* yang saling terkait.

Penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh: Renaldi Putra(2014) yang berjudul: “Penerapan Konsep *Value for Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Polres OganIlir”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian nya adalah data anggaran dan realisasi anggaran Polres OganIlir bagian SIM tahun 2011 sampai 2013 sudah memenuhi 2 elemen *value for money* yaitu ekonomis dan efisien meskipun pada elemen efektivitas tidak efektif. Perhitungan rasio ekonomis kurang dari 100% kecuali tahun 2011. Rasio efisiensi cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya, kecuali pada tahun 2011. Dan rasio efektivitas tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan *value for money* dan rumus yang digunakan pada rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Sanjaya, dkk. (2019) analisis *Value for Money* untuk pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas ditanyakan berhasil mencapai tujuan dan sasaran nya dari segi efisiensi seiring dengan peningkatan *output* kinerja pelayanan. Dari sudut pandang ekonomi, sekarang dimungkinkan untuk mencapai anggaran yang lebih terjangkau.

Nazril (2013), dalam penelitian berjudul penerapan konsep *Value For Money* dalam menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji Kota Makasar. Hasil Penelitian ini yaitu pelayanan rumah sakit umum daerah Labuang Baji Kota Makasar telah Memenuhi prinsip *value for*

money yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis kuisioner yang disebarakan kepada pelanggan/konsumen.

Maka dari beberapa pernyataan dan telaah teori diatas dapat dipahami bahwa, tiga elemen utama dalam konsep *Value For Money* sangat penting digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah atau sektor pelayanan publik lainnya. Hal ini guna menghindari terjadinya pengeluaran yang boros dan tidak produktif, dalam organisasi pelayanan publik. Dengan kata lain organisasi harus mengedepankan sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sehingga organisasi lebih dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, maka terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada subyek dan objek penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut alasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sektor publik sering kali menghadapi tantangan dalam hal alokasi sumber daya yang terbatas dan tuntutan pelayanan yang terus meningkat. Dengan menilai kinerja menggunakan konsep *Value For Money*, Dinas Kesehatan Provinsi dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik, memastikan bahwa pelayanan tetap optimal meskipun ada keterbatasan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENERAPAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DALAM MENILAI KINERJA PELAYANAN SEKTOR PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Penerapan Konsep *Value for Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan konsep *value for money* dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur jika ditinjau dari elemen 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

4.1.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan konsep *value for money* dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jika ditinjau dari masing-masing elemen 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas).

4.1.2. Manfaat Penelitian

4.1.2.1. Manfaat Akademik

Memberikan informasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui pendekatan *value for money* dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis.

4.1.2.2. Manfaat Praktis

Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus penilaian kinerja dengan konsep *value for money* sebagai evaluasi kerja yang selama ini dijalankan.